

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Adji, Seno, Oemar. 1966. *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*. Jakarta: Simposium UI.

Amirmachmud. 1984. *Demokrasi Undang-Undang dan Peran Rakyat*. Jakarta: No. 8 LP3ES.

Asshiddiqie, Jimly. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.

-----, 2007. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

-----, 2003. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

-----, 2020. *Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress).

Atmaja, Wija, Marhaendra, Gede. 2016. *Ilmu Perundang-undangan*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Azhary. 1995. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif dan Unsur-unsurnya*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Azhary, M Tahir. 2003. *Negara Hukum: Suatu studi Tentaang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode negara Madinah dan masa kini*. Jakarta: Prenada Media.

- Budiardjo, Mariam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Dhianta, Pasek, Made. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fahmal, Muin. 2008. *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Yogyakarta: Total Media.
- Huda, Ni'Matul. 2014. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- HR, Ridwan. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indrati, Farida, Maria. 2019. *Ilmu Perundang-undangan*. Jakarta: Karsinus.
- Ismawan, Riswandha. 2000. *Reformasi Politik dan Demokratisasi Bangsa dalam Menuju Tata Indonesia Baru*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kurniawan, Mahendra. 2007. *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Kusnardi.Moh & Ibrahim Harmaily. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- Kusnadi.Moh & Sarigih Bintan. 2008. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- MD, Moh Mahfud. 1993. *Demokrasi Konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

- Nur, Deliar. 1983. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Palguna, I Gede. 2018. *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran Kewenangan dan Perbandingan dengan Negara lain*. Jakarta: Konpress.
- Purnama, Eddy. 2007. *Negara Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Nusamedia.
- Siahaan, Patiniari. 2012. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amademen UUD NRI TAHUN 1945*. Jakarta: Konpress.
- Suseno, Magnus, Frans. 1997. *Mencari sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sinamo, Nomensen. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Permata Aksara.
- Thaib, Dahlan. 1999. *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*. Yogyakarta: Liberty.
- Tiro, Muhammad Hasan. 1999. *Demokrasi Untuk Indonesia*. Jakarta: Teplok Press.
- Mahardhika, Gelora, Ahmad. 2020. *Potensi Penyimpangan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang*. Jurnal Hukum IUS QUIA Iustum. Vol. 27. No. 2.
- Mamudji Sri & Soekanto, Soerjono. 2014. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Mahmud, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moonti, Marthen, Roy. 2017. *Ilmu Perundang-undangan*. Makassar: Keretakupa.
- Fahmal, Muin. 2008. *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Yogyakarta: Total Media

B. Perundang-Undang dan Putusan Pengadilan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan serta Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 138/PUU/VII/2009.

-----Nomor 34/PUU-XVII/2020.

-----Nomor 49/PUU-XVIII/2020.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Jurnal

Armandz, Zahermann. 2017. *Negara Berdasarkan Hukum (Rechstaats) Bukan Kekuasaan (machstaat)*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. No. 3.

Bagus, Rizki. 2021. *Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan Hukum*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol. 15, No. 2.

Febriansyah. 2016. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Vol. XXI No.3.

Juliani, Henny. 2020. *Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020*. Jurnal Administrative law & Governance. Vol. 3 No. 2.

Lailam, Tanto. 2011. *Analisis Praktik Pengujian Formil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal Pranata Hukum. Vol. 6, No. 2.

Mariah, Siti. 2015. *Kewenangan Konstitusional Presiden terhadap hal ihwal Kegentingan yang Memaksa*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol. 44, No. 3

Rihan, Idul. 2021. *Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Vol.18, No. 1.

Simarmata, Jorawati. 2017. *Pengujian Undang-Undang Secara Formil oleh Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 14, No. 1.

D. Modul

Sonny Maulana, dkk, *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*. Modul 1,

E. Internet

DPR, DPR Sahkan Perppu No. 1 Tahun 2020 Menjadi UU,
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28732/t/DPR+Sahkan+Perppu+Nomor+1+Tahun+2020+Jadi+UU>.

Hukum Online. Dinilai kehilangan objek mk mentahkan uji perppu covid-19,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ef1ba95c8236/dinilai-kehilangan-objek--mk-mentahkan-uji-perppu-covid-19/>

Hukum online, Pandangan Jimly terhadap pembentukan Perppu,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eaf518c0f3c3/pandangan-jimly-terkait-perppu-penanganan-covid-19/>.

Nasional Kompas. Perppu 1 2020 terbit dan disahkan dalam satu kali masa sidang
<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/20/13435901/perppu-1-2020-terbit-dan-disahkan-dalam-satu-kali-masa-sidang-dpr-pemohon?page=all>

F. Wawancara

Wawancara dengan Bapak DR. H. Jazuli Juwaini Lc. M.A selaku Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

